

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perhitungan atas biaya layanan dapat membantu mengidentifikasi besarnya waktu sekaligus biaya yang diperlukan atas suatu layanan untuk dapat dilakukan efisiensi. Penghitungannya dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan metode *Time Driven Activity Based Costing*. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode *activity-based costing* yang telah banyak dikenal namun lebih sederhana dan mudah untuk diaplikasikan, serta berbiaya lebih rendah dalam penerapannya. Metode ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu *unit cost* dan estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas atau kegiatan.

Dari penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bontang dan KPP Pratama Semarang Candisari, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. *Unit cost* di KPP Pratama Bontang untuk seksi pelayanan adalah sebesar Rp 3.998,93/menit, di seksi pengawasan dan konsultasi sebesar Rp 4.371,35 /menit, di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan sebesar Rp 4.229,23/menit, di seksi pemeriksaan dan kelompok fungsional sebesar Rp 4.788,27/menit, dan di seksi penagihan sebesar Rp 4.716,76/menit.
2. *Unit cost* di KPP Pratama Semarang Candisari untuk seksi pelayanan adalah sebesar Rp 3.585,91/menit, seksi pengawasan dan konsultasi sebesar Rp 3.526,06/menit, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan sebesar Rp 3.129,17

/menit, seksi pemeriksaan dan kelompok fungsional sebesar Rp 4.043,76 /menit, dan di seksi penagihan sebesar Rp 3.547,31/menit.

3. Biaya layanan di kedua KPP tergantung pada besaran *unit cost* masing-masing seksi di kedua KPP Pratama dan estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan. DJP telah mengendalikan estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara rutin, serta pengadaan peralatan utama secara terpusat sehingga kualitasnya dapat seragam. Namun besaran *unit cost* belum dapat dikendalikan karena belum adanya suatu nilai tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan besaran *unit cost* maupun biaya layanan sehingga belum dapat dilakukan efisiensi sumber daya dengan optimal.

B. Saran

Dengan melakukan perhitungan atas biaya layanan dan dibandingkan dengan KPP Pratama lain, dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya ini dapat berupa pengaturan pola mutasi untuk menyusun komposisi pegawai yang tepat, perencanaan anggaran, serta pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah saran yang dapat diberikan terkait hasil perhitungan biaya layanan yang dilakukan di KPP Pratama Bontang dan KPP Pratama Semarang Candisari.

1. Besaran *unit cost* yang beragam dan memiliki selisih cukup jauh membuat besaran biaya layanan menjadi sangat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu nilai tertentu sebagai acuan sehingga setiap kepala KPP Pratama dapat melakukan efisiensi atas *unit cost*-nya masing-masing. DJP perlu menentukan besaran nilai acuan ini yang berlaku untuk seluruh KPP Pratama di Indonesia.
2. Besarnya *unit cost* di KPP Pratama Bontang disebabkan oleh lebih sedikitnya kapasitas praktis yang dimiliki oleh KPP Pratama Bontang dibandingkan dengan KPP Pratama Semarang Candisari. Besarnya kapasitas praktis dapat meningkat bila jumlah pegawai juga meningkat. Dengan demikian perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai di KPP Pratama Bontang sehingga besaran *unit cost* yang dihasilkan dapat sesuai dengan harapan.

3. Perbedaan utama KPP Pratama Bontang dengan KPP Pratama Semarang Candisari adalah pada luas dan karakteristik wilayah kerjanya. Oleh karena itu aktivitas yang melibatkan pekerjaan lapangan di KPP Pratama Bontang cenderung membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini perlu menunjukkan bahwa diperlukan penambahan pegawai di KPP Pratama dengan karakteristik yang serupa.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan perhitungan biaya layanan menggunakan metode *time driven activity based costing*, parameter yang digunakan yaitu *unit cost* dan estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam perhitungan *unit cost*, hal terpenting adalah pada penentuan jenis sumber daya yang dikonsumsi serta penentuan besaran sumber daya yang dikonsumsi. Atas biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung, pembebanannya dilakukan berdasarkan jumlah ruangan maupun jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan penghitungan biaya layanan dilakukan di akhir tahun anggaran dimana penghitungan biaya layanan belum pernah diterapkan. Meskipun jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan biaya yang dapat ditelusuri penggunaannya, namun hal ini dapat dikurangi dengan menerapkan model pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menghitung biaya layanan di awal tahun anggaran. Dengan demikian hasilnya akan lebih akurat.

Parameter yang kedua adalah estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan di sebuah KPP Pratama terdiri dari dua jenis, yaitu pekerjaan administratif yang bersifat klerikal dan pekerjaan yang bersifat analitis seperti pemeriksaan dan penelitian dalam rangka menerbitkan suatu produk hukum seperti Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penyelesaian atas pekerjaan yang bersifat analitis akan membutuhkan waktu yang sangat beragam dan bergantung kepada berbagai faktor seperti kecakapan individu, kerumitan berkas yang diteliti, jenis wajib pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu besarnya biaya layanan yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan. Dengan demikian, data yang dapat digunakan untuk memanfaatkan penerapan akuntansi manajemen adalah dengan membandingkan *unit cost* di setiap unit kerja dan berbagai biaya penyusunnya.